

HUKUM EKONOMI SYARI'AH, FUNGSI DAN PERAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS DIGITAL ERA INDUSTRI 4.0

Sanawi

sanawi@uinbanten.ac.id

Maulana Yusuf

maulanayusufserang2@gmail.com

Jamaluddin

jamaluddin@uinbanten.ac.id

Abstrak

Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus (shirat al mustaqim). (Ahmad Ramzy Tadjoeeddin, dkk, 1992: 3). Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan, Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur (QS. Al-A'raf: 10). Pada kesempatan lain dikatakan, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah (mencari rezeki kehidupanlah, pen) di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS.Al-Mulk: 15). Untuk itulah Allah SWT berfirman, Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu diakhiri dengan kalimat, Apabila kamu telah menunaikan salat, bertebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah.... (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Kata Kunci: hukum ekonomi syariah, era industri 4.0

A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi sangat berperan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik jangka panjang maupun pendek. Selain kegiatan akademik berupa pembelajaran, edukasi atau literasi keuangan, peran aktif warga kampus dalam mendukung kemajuan LKS sangat dibutuhkan. Selama ini praktik pembelajaran ekonomi syariah hanya diterapkan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan/program studi Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam, dan lainnya. Selain kampus yang tidak ada latar belakang ilmu ekonomi syariahnya dinilai tidak wajib melakukan literasi dan inklusi keuangan syariah. Padahal lembaga tersebut sangat berperan melakukan penguatan literasi keuangan pada mahasiswa. Strategi Perguruan Tinggi Memajukan Lembaga Keuangan Syariah.

Literasi keuangan sangat strategis diterapkan kepada seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang keilmuan mereka. Perguruan tinggi berperan menyiapkan-menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang keuangan syariah berkualitas. Hal itu sangat strategis untuk mendorong akselerasi kemajuan LKS. Mengapa? Karena lulusan itu akan berkecimpung di LKS, baik bank maupun nonbank. Kampus berperan dalam mengedukasi, menyadarkan, menjadikan mahasiswa “melek” keuangan untuk bekal kehidupan mereka di masyarakat sekaligus meningkatkan inklusi atau penggunaan jasa keuangan syariah.

Perkembangan perbankan syariah tidak dapat berjalan sendiri. Perkembangan itu membutuhkan kerja keras dari stake holders industri keuangan syariah. Dibutuhkan sinergitas semua elemen untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Perlu keterpaduan langkah dari para praktisi, akademisi maupun asosiasi agar pengembangan lebih efektif (Nofinawati, 2015: 182).

Langkah diatas sangat strategis diterapkan diabad ini. Apalagi tantangan Revolusi Industri 4.0 ini tidak hanya masalah perkembangan ekonomi global, namun juga penguatan literasi

dan SDM. Perguruan Tinggi baik negeri atau swasta selain dengan LKS harus bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjawab tantangan abad ini. Khususnya dalam menyiapkan SDM keuangan syari'ah berkualitas dan implementasi literasi keuangan pada mahasiswa.

Pada Januari 2018, Indonesia melalui Kimristek Dikti mengundang perguruan tinggi terbaik di dunia untuk bekerja sama dalam meningkatkan mutu institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam agenda The Education Word Forum 2018: Global Summit for Education Minister, di London, 25 Januari 2018, Kemenristek Dikti mempersiapkan orientasi dan literasi baru dalam bidang pendidikan tinggi, terutama terkait erat dengan persiapan SDM dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 (Yohanes Enggar Harususilo, 2018).

Sejak tahun 2015, Kemendikbud dan Kemenristek Dikti sudah menggaungkan solusi untuk menjawab ketertinggalan bangsa ini dengan tiga pilar, yaitu kompetensi, karakter dan literasi. Semua perguruan tinggi yang mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus mampu menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi, karakter, dan kemampuan literasi khususnya di bidang ekonomi syari'ah. Untuk itu dibutuhkan strategi relevan agar dapat mencetak SDM berkualitas dan berdaya saing di era Revolusi Industri 4.0 ini.

Era Revolusi 4.0 tidak sekedar wacana. Akan tetapi sangat nyata dan harus dijawab bersama. Bao Xing dan Marwala (2016) dalam buku *Implication of the Fourth Industrial Age on Higher Education* (Irawan, 2018, p. 6) menyatakan Revolusi Industri 4.0 mengintegrasikan rantai nilai vertikal dan horizontal dengan menghubungkan secara digital semua unit produktif dalam perekonomian.

Revolusi Industri 4.0 tidak boleh sekedar dipahami pada aspek disrupsi (ketercerabutan), otomatisasi dan hilangnya pekerjaan karena semua tergantikan mesin. Akan tetapi tantangan Revolusi Industri 4.0 juga melahirkan peluang. Maka penguatan literasi baru menjadi keniscayaan. Jika dulu kaum terdidik hanya

diwajibkan menguasai literasi lama (membaca, menulis, berhitung), namun Era Revolusi Industri 4.0, akademisi termasuk di dunia ekonomi syari'ah diwajibkan menguasai literasi baru, yaitu literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan keuangan syari'ah di Indonesia dilakukan berbagai program yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan lintas sektor. Permasalahan bersama yang dihadapi ketiga sektor keuangan syari'ah antara lain keterbatasan suplai produksi syari'ah, keterbatasan akses akan produk keuangan syari'ah, masih rendahnya tingkat literasi keuangan, keterbatasan SDM, perlunya optimalisasi koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta perlunya kebijakan jasa keuangan yang selaras dan dapat saling mendukung perkembangan seluruh sektor keuangan syari'ah.

Dengan memperhatikan permasalahan itu, visi *Roadmap Pengembangan Keuangan Syari'ah Indonesia 2017-2019* yaitu mewujudkan industri jasa keuangan syari'ah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syari'ah dunia (ojk.go.id, 2017). Untuk mewujudkan hal itu tentu membutuhkan sinergi semua elemen yang dapat dilakukan perguruan tinggi.

Dari *Roadmap Pengembangan Keuangan Syari'ah Indonesia 2017-2019*, ada misi yang fokus harus dilakukan perguruan tinggi. Selain penguatan SDM di bidang ekonomi syari'ah, pada Misi 3 yaitu "Meningkatkan Inklusi Produk Keuangan Syari'ah dan Koordinasi dan Pemangku Kepentingan untuk Memperbesar Pangsa Pasar Keuangan Syari'ah ada anjuran untuk melakukan literasi keuangan.

Strategi Perguruan Tinggi Memajukan Lembaga Keuangan Syari'ah *EQUILIBRIUM*, Volume 6, Nomor 1, 2018 148

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan syari'ah menjadi faktor sangat penting dalam dalam mendorong keuangan syari'ah. Penggunaan suatu produk keuangan syari'ah oleh masyarakat sangat dipengaruhi tingkat

pemahaman terhadap fungsi, jenis dan karakteristik dari produk keuangan syariah. Hasil survei literasi OJK pada tahun 2016 menunjukkan, tingkat literasi (pemahaman) dan tingkat inklusi (pemanfaatan/utilitas) masyarakat tentang produk dan jasa keuangan syariah masih rendah.

Hal tersebut ditunjukkan dengan indeks keuangan syariah baru mencapai sebesar 8,11% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 11,06%. Sementara indeks literasi keuangan konvensional mencapai 29,66% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82%. Indeks inklusi keuangan syariah yang lebih tinggi dibandingkan indeks literasi menunjukkan masyarakat yang sudah menggunakan produk keuangan syariah walaupun belum memahami komprehensif tentang fitur produk, kemanfaatan serta resiko produk dan jasa keuangan syariah (OJK, 2017:44).

Sementara pada Program 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang ditujukan kepada seluruh pihak yang berperan aktif dalam pengembangan dan operasional keuangan syariah. Hal ini mempengaruhi upaya pengembangan bidang lainnya seperti pengembangan produk dan layanan (OJK, 2017: 47).

Dari penjelasan di atas, perguruan tinggi sangat berperan dalam memajukan LKS menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 yang makin kompleks ini. Perlu strategi agar perguruan tinggi harus dapat menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi digital dan kemampuan literasi baru. Selain berperan menyiapkan SDM keuangan syariah berkualitas, perguruan tinggi dengan disiplin ilmu apa saja diharapkan dapat melakukan literasi keuangan pada mahasiswa.

Kemampuan literasi di abad ini memang sangat berbeda. Jika literasi lama hanya sekedar membaca, menulis, berhitung sangat kurang karena era Revolusi Industri 4.0 menuntut mahasiswa mampu menguasai literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Semua perguruan tinggi harus merespon hal ini untuk menciptakan iklim ekonomi syariah yang maju di abad ini. Jika kemampuan literasi secara akademik kuat, maka akan

mendorong kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan produk keuangan syari'ah, baik secara lokal maupun nasional.

B. Kajian Literatur

1. Tantangan Lembaga Keuangan Syari'ah di Era Revolusi Industri 4.0

Secara Konseptual, embrio Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah dari sistem ekonomi syari'ah itu sendiri. Sistem ekonomi syari'ah merupakan perwujudan paradigma Islam. Pengembangan sistem ini tidak diperuntukan bersaing atau mengalahkan sistem ekonomi (kapitalis, sosialis, mix conomic) sebelumnya. Akan tetapi sebagai sistem pencarian sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan ganda yang lebih banyak untuk menutupi kekurangan-kekurangan sistem ekonomi yang telah ada (Ghozali, 2018:12).

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mendefinisikan Lembaga Keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syari'ah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah (Rahayu, 2005: 1). LKS merupakan lembaga, baik bank maupun nonbank yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya yang dalam pelaksanaannya diawasi Dewan Pengawasan Syari'ah (Muhammad Asidicky, 2017).

Penjelasan diatas menyaratkan LKS minimal memenuhi dua unsur. Mulai kesesuaian dengan syari'ah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Selain itu, dalam praktiknya LKS harus mampu menyesuaikan zaman dengan tantangan yang ada. Di era yang semua hal tidak bisa lepas dari aktivitas keuangan, LKS memiliki tantangan pada aspek pengelolaannya yang harus benar-benar bersih dari praktik riba, gharar dan wajib memegang teguh prinsip Islam. Di sisi lain, SDM yang bekerja di LKS harus profesional karena berkaitan dengan hidup dan matinya LKS itu sendiri.

Dari total Jaringan Kantor Individual Perbankan Syari'ah untuk Bank Syari'ah ditambah dengan bank konvensional yang membuka layanan syari'ah, tentu SDM kita memiliki potensi

besar untuk terserap kesana. Belum lagi potensi lowongan kerja di LKS nonbank yang berbentuk asuransi, Badan Amil Zakat (BAZ), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), pegadaian dan lainnya.

Tantangan pada LKS ini sekaligus tantangan dan peluang bagi perguruan tinggi pula. Kampus sebagai pencetak sarjana ekonomi diharap tidak sekedar membekali mahasiswa pada aspek kognitif (pengetahuan) saja, namun juga aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) yang menyesuaikan keterampilan abad ini yaitu memahami literasi baru dan digitalisasi industri.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam diharapkan dengan lembaga keuangan yang islami yaitu mengembangkan sistem LKS harus dikelola secara lebih baik lagi. Pada dasarnya, LKS merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran Islam tentang ajaran riba dan gharar. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga (Lubis, 2004:33).

Dalam aktivitasnya, LKS terdiri atas dua variabel, yaitu perbankan dan nonbank. Kategori nonbank yaitu lembaga zakat, lembaga ijarah, kafalah, salam, rahn, akad, warits, qiradh, syirkah dan lainnya. Sementara kategori perbankan yaitu wadiah, mudharabah, musyarakah, bai'u bithaman ajil dan lainnya.

Dalam perjalanannya LKS mengalami kendala, terutama SDM yang mengisi pos-pos LKS tersebut. Selain harus bisa menetapkan sistem syari'ah dengan sebenarnya, SDM yang bergerak di bidang ekonomi syari'ah harus dapat menyesuaikan kemajuan zaman karena tantangan saat ini semakin kompleks dan harus disiapkan sejak dini.

SDM perbankan syari'ah saat ini masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitas. Perguruan tinggi yang mengajarkan mengenai ekonomi syari'ah belum mampu menyediakan seluruh SDM dibutuhkan. Akhirnya, SDM itu harus dipasok perguruan tinggi umum. Seringkali terjadi dikotomi antara perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi umum.

Apabila perguruan tinggi agama dalam pengajarannya lebih menekankan mengenai aspek fiqih semata dan kurang materi praktisnya. Sedangkan perguruan tinggi umum terlalu banyak aspek praktisnya dan kurang materi fikih. Hal ini harus dipecahkan secara bersama bagaimana menyusun suatu kurikulum yang mampu memadukan antara kurikulum umum, fikih dan praktik (Al-Arif, 2012:76).

Selain tantangan diatas, memasyarakatkan LKS di Indonesia sangat susah ada beberapa masalah mendasar yang saat ini dihadapi. Pertama, kekurangyakinan atau ketidakpercayaan sebagian besar umat Islam akan kelebihan LKS untuk mendatangkan cita-cita rahmatan lilalamin. Kedua, kelangkaan pengetahuan konseptual dan kekurangan informasi praktis mengenai lembaga-lembaga keuangan Islam. Ketiga, kekurangan bukti empiris atau contoh nyata yang bisa dijadikan sarana keyakinan umat mengenai keberhasilan lembaga keuangan Islam serta manfaatnya bagi umat (Muhammad, 2002:145).

Selain masalah di LKS sendiri, tuntutan zaman semakin kompleks, khususnya di era Revolusi Industri 4.0 ini. Jika tahun 2015 kita dihadapkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka di tahun ini kita dihadapkan dengan Revolusi Industri 4.0. Era ini menuntut sarjana ekonomi harus berbeda dan unggul dibandingkan sarjana lain karena hanya mereka yang secara keilmuan lebih mumpuni bergerak di bidang ekonomi syari'ah.

Secara konseptual, definisi Revolusi Industri 4.0 masih berbeda-beda. Pasalnya, karena konsep ini masih diteliti para ilmuwan atau akademisi sesuai disiplin ilmu masing-masing. Irianto (2017) dalam karya *Industry 4.0; The Challenges of Tomorrow* (Yahya, 2018, p.9) menjelaskan tantangan Industri 4.0 meliputi beberapa hal. Pertama, kesiapan industri. Kedua, tenaga kerja terpercaya. Ketiga, kemudahan pengaturan sosial budaya. Keempat, diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja dan peluang industri 4.0 yaitu inovasi ekosistem, basis industri yang komprtif, investasi pada teknologi dan integrasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kewirausahaan.

Dari penjelasan diatas, tantangan LKS sekaligus menjadi tantangan perguruan tinggi. Revolusi Industri 4.0 mendatangkan tantangan mendasar di bidang ekonomi syari'ah. Mulai konsistensi melaksanakan prinsip dan praktik ajaran Islam, susahny mencari pekerjaan karena sudah berkonversi ke digital, disruption (ketercerabutan), perdagangan dan transaksi keuangan yang muali bebas, dan lainnya.

Untuk itu, perguruan tinggi khususnya yang menyelenggarakan program studi ekonomi/ekonomi syari'ah harus dapat menjawabnya. Perguruan tinggi terutama yang membuka prodi/jurusan ekonomi/ekonomi syari'ah harus merespon hal di atas dengan melakukan terobosan strategi. Mulai dari penyusunan kurikulum hingga pendampingan lulusan agar terserap di LKS dan LKS tersebut benar-benar menyaring SDM berkualitas yang kompatibel dengan kesarjanaannya.

Perguruan tinggi sangat berperan dalam menyiapkan SDM ekonomi syari'ah berkualitas, berbeda, dan memiliki kompetisi digital di era Revolusi Industri 4.0 ini. Semua itu menjadi tugas berat perguruan tinggi terutama yang membuka program studi/jurusan atau yang serumpun dengan ilmu ekonomi/ekonomi syari'ah.

Tidak hanya berperan menerapkan menyiapkan SDM berkualitas, perguruan tinggi sangat strategis menerapkan literasi keuanagn dan inklusi keuangan agar dapat memberi sumbangsih pada LKS. Perguruan tinggi juga berperan mengedukasi mahasiswa yang ke depan dapat berkecimpung di dunia perbankan syari'ah, baik terjun bekerja di perbankan syari'ah ataau menggunakan jasa LKS.

C. Pembahasan

1. Strategi Perguruan Tinggi Menyiapkan SDM Berkualitas

Jika dipetakan, strategi perguruan tinggi dalam memajukan LKS dapat dilakukan jangka panjang dan pendek. Jangka panjangnya, perguruan tinggi harus mendesain strategi baru dalam menyiapkan SDM berkualitas di bidang ekonomi syari'ah.

Strategi utama perguruan tinggi penyelenggara program studi ekonomi/ekonomi syari'ah adalah menyiapkan SDM yang berkualitas sesuai capaian pembelajaran dan profil lulusan yang mereka buat dengan menyesuaikan zaman. Hal itu sudah sesuai prinsip pengembangan kurikulum perguruan tinggi yang mengacu pada KKNI-SNPT (SN Dikti) sesuai Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 yang memberikan kewenangan perguruan tinggi mengembangkan kurikulumnya sendiri. Maka semua perguruan tinggi pengelola Strategi Perguruan Tinggi Memajukan Lembaga Keuangan Syari'ah

Prodi/jurusan ekonomi/ekonomi syari'ah harus memberikan daya tawar beerbeda dengan yang lain.

Penyiapan SDM ekonomi syari'ah berkualitas tidak terpatri pada perguruan tinggi atau fakultas, melainkan paad prodi,jurusan. Indikator prodi berkualitas atau tidak adalah pada akreditasi, kurikulum, dosen, mutu pembelajaran, karya dan prestasi mahasiswa, keterserapan lulusan pada user (pemakai), dan kepercayaan masyarakat paad prodi tersebut dan kualitas secara umum dalam Tri Darma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi negeri atau swasta hakikatnya sama, karena yang paling penting saat ini adalah akreditasinya, tidak sekadar gedung dan namanya saja.

Dari tahun ke tahun, program studi di bidang ilmu Ekonomi atau Ekonomi Islamn semakin banyak. Secara kuantitas, jumlah ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan berat. Mengapa? Karena dengan jumlah lulusan yang menjamur harus diimbangi dengan kualitas lulusan yang mumpuni.

Perguruan Tinggi harus menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 ini dengan melakukan beberapa penguatan. Pertama, pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, pusat pengembangan inovasi bekerjasama dengan sektor industri. Ketiga, pusat studi dengan sistem pembelajaran berjenjang, tersistem. Keempat, urgensi program pengembanagn karakter. Kelima, menjadi wadah interaksi osial anantara pelajar dengan pengajar yang memanfaatkan teknologi (Irawan, 2018, p.26).

Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM tersebut ditujukan terhadap seluruh pihak yang berperan aktif dalam pengembanagn dan operasional perbankan syari'ah, anggota Dewan Pengawas Syari'ah, termasuk perguruan tinggi.

Strategi Perguruan Tinggi Memajukan Lembaga Keuangan Syari'ah

Dalam lima tahun terakhir, dari sisi kuantitas, industri perbankan Syari'ah. Pada tahun 2013 tercatat hanya 40.101 orang tenaga kerja pada perbankan syari'ah, dan meningkat menjadi 60.365 orang tenaga kerja pada tahun 2017. Namun jika dilihat perkembangannya, pertumbuhan tenaga kerja perbankan syari'ah cenderung stagnan sejak tahun 2015 (Luci Irawati dkk, 2017:49)

Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, OJK (ojk.go.id, 2017:48-49) memiliki beberapa program.

1. Membentuk Kelompok Kerja/Bidang Ekonomi Syari'ah Forum Rektor Indonesia terkait Penyusunan Kurikulum Keuangan Syari'ah.
2. Menyelenggarakan Training for Trainers Keuangan Sayri'ah.
3. Mengembangkan Program Sertifikat dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan.
4. Melakukan Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi untuk Mencetak SDM yang Andal:
 - a. Mengembangkan Materi Keuangan Syari'ah dan Memberikan Kegiatan Training for Trainers bagi Akademisi.
 - b. Melakukan Riset di Bidang Keuangan Syari'ah.
 - c. Mendorong Program Link dan Mach untuk Kebutuhan SDM di Bidang Keuangan Syari'ah.
5. Memberdayakan Asosiasi Industri dalam Peningkatan Kualitas SDM Keuangan Syari'ah.

Disisi lain, penguatan SDM di perguruan tinggi ini bisa dilakukan dengan beberapa terobosan. Pertama, penguatan kurikulum mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

(KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) di tiap Prodi Ekonomi Syari'ah. Kurikulum ini harus menyasar pada produk, bermuatan literasi abad ini, dan berorientasi pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna menyiapkan SDM yang ke depan berkecimpung di dunia LKS. Kurikulum mengacu KKNISNPT harus benar-benar terlaksana dan tidak sekedar "rasa KKNI-SNPT" saja. Kurikulum ini sangat relevan karena berbasis produk, event, berpusat pada mahasiswa, dan mengandung kecirian di masing-masing perguruan tinggi.

Kedua, pembelajaran yang berorientasi pada contextual learning di lapangan khususnya pada Prodi Ekonomi Syari'ah yang bisa bekerjasama dengan LKS. Model PPL/KKN harus menyasar secara menyeluruh dari aspek manajemen, sampai strategi pengembangan di setiap LKS. Sebab selama ini kebanyakan LKS *close management* ketika ada mahasiswa PPL/KKL di tempat tersebut. Hal ini sangat penting, karena manajemen dalam pelatihan para mahasiswa menjadi indikator kesuksesan dalam menyiapkan *output* maupun *outcomes* SDM berkualitas (Makhrus, 2015:65).

Ketiga, sinergitas dengan OJK maupun LKS dalam menguatkan Training of Trainers (TOT) keuangan syari'ah, bisa melalui workshop, lokakarya, Diklat, seminar, FGD, dan lainnya. Selama ini, TOT Keuangan Syari'ah DPBS-OJK dengan Direktorat Pasar Modal Syari'ah dan Direktorat Industri Keuangan Syari'ah masih terbang pilih dan belum merata.

Pada tahun 2016 ToT Keuangan Syari'ah dilaksanakan di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Politeknik Keuangan Negara (PKN/STAN) Tangerang dan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Sementara berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syari'ah 2017, pada tahun 2017 ToT Keuangan Syari'ah dilaksanakan di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Lampung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau (Luci Irawati dkk, 2017:88).

Ke depan, OJK harus menasar ke perguruan tinggi swasta baik di bawah Kemenristek Dikti atau Kemenag. Pasalnya, banyak sekali perguruan tinggi membutuhkan sentuhan edukasi dalam menguatkan SDM melalui ToT Keuangan Syariah. Mengapa urgen? Karena setiap perguruan tinggi perlu melakukan peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan di luar jam perkuliahan.

Perlu juga kerjasama yang menguatkan pada sertifikasi profesi yang menjembatani mahasiswa dapat menjadi “tenaga profesional” di bidang ekonomi syariah. Dengan menggandeng asosiasi profesi, OJK, dan LKS, maka SDM yang digembleng di perguruan tinggi tersebut benar-benar berkualitas.

Keempat, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan di luar negeri. Bisa dalam ranah pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kerjasama ini menjembatani mahasiswa untuk melakukan magang di luar negeri, praktik nyata di lapangan. Dan mengembangkan riset-riset terbaru sesuai kebutuhan zaman.

2. Strategi Literasi Keuangan di Perguruan Tinggi

Strategi selanjutnya adalah jangka pendek yang bisa dilakukan di perguruan tinggi dengan cara menguatkan literasi keuangan pada mahasiswa. Jika strategi pertama hanya terbatas pada prodi/jurusan ekonomi/ekonomi syariah, namun literasi keuangan ini dapat dilakukan semua perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan DIY.

Meski secara kuantitatif jumlah di atas tergolong banyak, akan tetapi tingkat literasi dan keuangan syariah di Jawa Tengah dan DIY tergolong rendah. Survei literasi dan inklusi keuangan OJK tahun 2018, menemukan Jawa Tengah sebesar 9,45% dan inklusinya sebesar 13,45%. Hal ini sangat jauh dibandingkan dengan literasi dan inklusi keuangan secara umum dimana literasi dan inklusi di DIY Sebesar 38,55% dan 76,79%. Rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan industri jasa keuangan syariah. Dalam

menjawab tantangan Era Revolusi Industri 4.0 dan guna mendapatkan kesempatan menjadi SDM kompetitif, pendidikan tinggi harus membekali mahasiswa dan lulusannya dengan lifelong education berupa literasi baru, yaitu big data dan programming, literasi teknologi dan literasi manusia (Paristiyani Nurwandi, 2018:4).

Ada beberapa faktor yang secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Salah satu bentuk itu adalah program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat (Halim Alamsyah, 2012:30).

Untuk itu, literasi keuangan ini dapat dilakukan dengan beberapa formula. Pertama, penguatan literasi keuangan pada wilayah aksi nyata. Caranya, dengan melakukan literasi keuangan menyeluruh di semua perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa melakukan edukasi, promosi, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis ekonomi syariah. Kegiatan edukasi atau pendidikan ini merupakan strategi mendasar menumbuhkan pemahaman terhadap ekonomi syariah pada umumnya dan bank syariah pada khususnya. Kegiatan edukasi ini harus menjadi strategi bersama baik pemerintah melalui kementerian terkait (Anny Ratnawati, 2011:13). Untuk itu, literasi keuangan sangat strategis dilakukan terutama di perguruan tinggi terutama di perguruan tinggi karena saat ini hampir semua mahasiswa membutuhkan produk bank syariah.

Kedua, penguatan literasi keuangan berbasis literasi baru yang menasar pada kemampuan literasi data, teknologi, dan literasi manusia. Pasar kerja saat ini membutuhkan berbagai kombinasi skills, 80% perusahaan mencari jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja baik di dalam. Hamidulloh Ibdan tim.

Kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi (big data) di dunia digital masih kurang, oleh karena itu kiat harus mengisi kekurangan tenaga kerja dalam bidang digital

di Era Revolusi Industri 4.0 kita perlu mengembangkan literasi baru yaitu data, teknologi dan SDM. Literasi data mengharuskan mahasiswa dapat memanfaatkan dan mengelola data, menerapkannya kedalam teknologi dan tentunya kita harus memahami cara penggunaan teknologi tersebut. Literasi teknologi merupakan pengembangan ilmu pengetahuan, penerapan pilar literasi dari konvensional menuju digital dengan ruh melek, dan ramah dalam membaca, menulis, dan menyebarkan informasi. Jika ditarik ke teknis perkuliahan, literasi teknologi bisa dimasukkan kedalam mata kuliah Aplikasi Komputer, Multimedia Pembelajaran, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Bahasa Indonesia Dasar dan lanjutan, Karya Tulis Ilmiah, Pembelajaran Literasi dan lainnya. Literasi SDM menjadi akhir dari literasi data dan teknologi. Sebab, perguruan tinggi dalam menyambut Era Revolusi Industri 4.0 ini diharuskan mencetak generasi yang melek literasi data dan teknologi (Ahmadi, 2018). Literasi manusia menjadi penting untuk bertahan di era ini, tujuannya adalah agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia dan dapat memahami interaksi dengan sesama manusia. Kampus perlu mencari metode untuk mengembangkan kapasitas kognitif mahasiswa, yaitu higher order mental skills, berpikir kritis dan sistematis karena penting untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0 (Ristekdikti, 2018).

Jika disinkronkan dengan literasi keuangan, maka semua kegiatan edukasi tentang keuangan syariah tidak boleh sebatas “penyadaran”. Namun harus melibatkan mahasiswa turut meneliti, mengembangkan, dan melakukan inovasi terhadap produk-produk keuangan syariah agar dapat berkembang sesuai basic need (kebutuhan dasar) mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa juga harus dikuatkan dalam kemampuan literasi data. Sebab, ketika mereka lulus, literasi data perusahaan merupakan kemampuan karyawan perusahaan untuk membaca, menganalisis, dan memanfaatkan data untuk keputusan, serta mengkomunikasikan dan menggunakan pengetahuan data

tersebut dalam pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Selain memiliki tenaga kerja literasi data, organisasi harus memastikan keterampilan ini digunakan pengambilan keputusan di seluruh bisnis untuk bersaing dalam Revolusi Industri 4.0. Meskipun korelasi yang jelas antara nilai perusahaan dan korelasi data, ada kesenjangan antara bagaimana perusahaan merasakan pentingnya dan relevansi dari sebuah data, serta bagaimana mereka secara aktif meningkatkan literasi data tenaga kerja. Sementara 92% pengambil

Strategi Perguruan Tinggi Memajukan Lembaga Keuangan Syari'ah Keputusan bisnis percaya bahwa penting bagi karyawan untuk literasi data, hanya 17% melaporkan bahwa bisnis mereka secara signifikan mendorong karyawan menjadi lebih percaya diri dengan data (Duniafintech.com, 2018).

Ketiga, memperbanyak kegiatan berupa sosialisasi, seminar, kuliah umum, atau berbasis praktik lapangan yang mengombinasikan kerjasama antara kampus, OJK, LKS, dan dinas-dinas terkait. Keempat, melakukan inovasi berbasis riset pada produk-produk ekonomi syari'ah yang jarang dijamah. Seperti contoh wisata syari'ah (alam, religi, kuliner, budaya), ecommerce, dan lainnya. Kelima, kerjasama paten dan kontinu antara perguruan tinggi dan LKS dengan membuat "simpanan mahasiswa" (Sima). Strategi ini sangat potensial karena melihat jumlah pereguruan tinggi di Indonesia melimpah dan mahasiswa menjadi mandiri dan yakin ketika memiliki tabungan berbasis syari'ah. Hal ini sudah diterapkan di jenjang SD-SMA yang berbentuk "simpanan pelajar" atau simpel yang sudah diterapkan di beberapa daerah.

Keenam, beasiswa pendidikan atau kredit pendidikan yang menjadi produk dari LKS itu sendiri. Bagi mahasiswa mampu tentu aman-aman saja ketika membayar SPP, namun bagi yang miskin, sangat membutuhkan bantuan dari LKS yang itu sangat membantu mahasiswa. Pada poin ini intinya, LKS harus melebarkan dan menginovasi produk layanan syari'ah untuk pendidikan. Produk layanan syari'ah tidak hanya sebatas wadiah

(simpanan), musyarakah (akad kerjasama), muzara'ah (kerjasama pengolahan pertanian), murabahah (perjanjian jual beli antara bank dan nasabah) dalam bisnis saja, namun juga perlu menysasar pada pendidikan tinggi dengan model beasiswa atau simpanan pendidikan. Literasi dan inklusi keuangan syari'ah bagaikan dua keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Semua kegiatan literasi keuangan di atas harus menghasilkan produk atau capaian nyata dengan mendorong mahasiswa bahkan mewajibkannya untuk menggunakan produk layanan syari'ah. Semua itu tidak akan tercapai ketika tidak ada konsistensi perguruan tinggi dan juga LKS yang ada.

C. Simpulan

Kemajuan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sangat ditentukan peran perguruan tinggi. Maka perguruan tinggi harus melakukan strategi jangka panjang dan pendek. Jangka panjang dilakukan dengan penyiapan

Hamidulloh IbdaSDM berkualitas khusus prodi/jurusan ekonomi/jurusan ekonomi/ekonomi syari'ah atau sesuai disiplin ilmu Ekonomi Islam.

Pertama, penguatan kurikulum mengacu KKNI-SNPT. Kedua, pembelajaran yang berorientasi pada contextual learning di lapangan khususnya pada Prodi Ekonomi Syari'ah yang bisa bekerjasama dengan LKS. Ketiga, sinergitas dengan OJK maupun LKS dalam menguatkan Training of Trainers (TOT) keuangan syari'ah, bisa melalui workshop, lokakarya, Diklat, seminar, FGD, dan lainnya. Keempat, kerjasama dengan lembaga keuangan syari'ah atau lembaga keuangan diluar negeri. Bisa dalam ranah pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sedangkan jangka pendeknya, dapat dilakukan dengan penguatan literasi keuangan. Pertama, penguatan literasi keuangan pada wilayah aksi nyata. Kedua, penguatan literasi keuangan berbasis literasi baru yang menysasar pada kemampuan literasi data, teknologi, dan literasi manusia. Ketiga, memperbanyak kegiatan berupa sosialisasi, seminar, kuliah

umum, atau berbasis praktik lapangan yang mengombinasikan kerjasama antara kampus, OJK, LKS, dan dinas-dinas terkait. Keempat, melakukan inovasi berbasis riset pada produk-produk ekonomi syari'ah yang jarang dijamah. Seperti contoh wisata syari'ah (alam, religi, kuliner, budaya), e-commerce, dan lainnya. Kelima, kerjasama paten dan kontinu antara perguruan tinggi dan LKS dengan membuat "simpanan mahasiswa". Keenam, beasiswa pendidikan atau kredit pendidikan yang menjadi produk dari LKS itu sendiri.

Strategi Perguruan Tinggi Memajukan Lembaga Keuangan Syari'ah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Gadai Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Ahmad, Anis. 1988 Reorientation of Islamic history: some methodological issues. In *Islam: Source and Purpose of Knowledge*. IIIT. Herndon: The International Intitute of Islamic Thought.
- Ahmad Zafrullah Tayibnapis, Lucia E. Wuryaningsih Jurnal: *International Juornal of Management & Business Studies*.
- Al-Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad. 1992. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Asy SYIFA.
- Aoun, JE. (2017). Robot-proof: heigher education in the age of articial intelligence. US: MIT Press Afwan, M. (2013). *Leadership on teachnical and vocational education incommunity college* [Versi Elektronik]. Journal of Education and Practice, 4 (21), 21-23.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1989. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Brofenbrenner, U. (1989). Ecological system theory. In r. Vasta (Ed). *Annals of Child Development* (Vol 6). Greenwich: CT, JAI Press.
- Cosseboom, Leighton. (2015). DiAMBIL 17 Juli 2019. 28 popular online shopping sites in Indonesia. <https://www.techinasia.com/popular-online-shopping-platforms-in-indonesia>.
- Dr. Suhrawandi K. Lubis. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edmon, A., & Oluiyi, A. (2014). Reengineering technical vocational education and training toward safety practice skill needs of sawmill workers against workplace hazards in Nigeria [Versielektronik]. *Journal of Education and Practice*, 5 (7), 150-157.
- Era Revolusi Industri 4.0: Perlu Persiapkan Literasi Data, Teknologi dan Sumber Daya Manusia. (2018). Diambil 17 Juli 2019 dari <http://belmawa.ristekdikti.go.id/2018/01/17/era-revolusi-industri-4.0-perlu-persiapkan-literasi-data-teknologi-dan-sumber-daya-manusia>.
- Hamdan. (2018), Journal Nusamba: *Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi*.
- Irianto, D. (2017). Industry 4.0; The Challengers of Tomorrow. Disampaikan pada Seminar Nasional Teknik Industri, Batu-Malang. Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig J (2013). *Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0* Industrie 4.0 Working Group, Germany.
- Kennedy, O.O (2011). Philosophical and sociological overview of vocational-technical education in Nigeria [Versi Elektronik]. *Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 1, 167-175.
- Triyuwono, Iwan. 2015. *Akuntan Syari'ah: Persepektif, Metodologi, dan Teori*/Iwan Triyuwono-Ed.2-Cet.4. Jakarta: Rajawali Pers.